



# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Nomor : SP12/SJ.04/II/2018

## SIARAN PERS

### **PELABUHAN PERIKANAN DOBO KEPULAUAN ARU DIJADIKAN SENTRA LUMBUNG IKAN NASIONAL**

DOBO (7/2) - Dobo (7/2) – Wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia menjadi lumbung perikanan dunia karena potensinya yang luar biasa. Terlebih dengan WPP wilayah timur yang umumnya belum tergarap dengan optimal, seperti perairan Maluku. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena dalam lawatan kerja Komisi IV DPRRI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan (PP) Dobo, Rabu (7/2).

“Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan di tiga WPP sebesar 3.055.504 ton per tahun, yang terdiri dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI Laut Banda sebesar 431.069 ton per tahun, WPP RI Laut Seram sebesar 631.701 ton per tahun, dan WPP RI Laut Arafura sebesar 1.992.731 ton per tahun. Namun potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 18,5% di tahun 2016, oleh sebab itu potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal, bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Michael di depan ratusan nelayan dan undangan yang hadir.

Pemanfaatan sumber daya ikan tersebut, lanjut Michael, harus diorientasikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan, terlebih nelayan tradisional dan lokal Maluku. Apalagi saat ini telah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang menjadi pijakan kokoh dalam menyajahterakan nelayan.

“Kita jalankan undang-undang tersebut dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Tidak boleh hanya wacana tanpa implementasi. Untuk itu, pada kunjungan kerja ini kami bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga membawa bantuan untuk nelayan kepulauan Aru,” tandas Michael.

Bantuan yang disampaikan antara lain kapal perikanan sebanyak 7 unit, alat penangkapan ikan sebanyak 37 paket, bantuan premi asuransi nelayan untuk 1.407 nelayan, serta fasilitasi permodalan nelayan bekerjasama dengan BRI untuk 820 nelayan dengan nilai sebanyak Rp 33,74 milyar.

Menurut Michael, pihaknya sengaja membawa rombongan Komisi IV DPRRI ke Kepulauan Aru untuk melihat langsung geliat dan permasalahan nelayan di kepulauan tersebut. “Kalau melihat langsung akan memperkuat dan mempengaruhi perasaan kita, dibanding kita hanya melihat proposal. Itu yang selalu saya lakukan di komisi, melihat langsung lapangan untuk melihat kebutuhan yang sebenarnya,” ujarnya.

Di samping rombongan komisi IV DPRRI, pada kunjungan kerja tersebut hadir pula Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) KKP Zulficar Mochtar, Bupati Kepulauan Aru Johan Gongga, Direktur Pelabuhan Perikanan KKP Frits P. Lessnusa, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far Far, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aru Ongki Gutandjala.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Aru Johan Gongga mengatakan bahwa masih banyak nelayan di Kepulauan Aru yang berkategori miskin. Salah satu penyebabnya adalah masih minimnya infrastruktur, serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, ia menyambut baik bantuan yang diadakan melalui APNB KKP. “ Kami sangat memohon perhatian dari Komisi IV DPRRI, KKP, juga pemerintah Provinsi Maluku dengan bantuan yang semakin besar untuk nelayan. Kalau APBN Kepulauan Arua yang terbatas, kita hanya mampu memenuhi 10% dari kebutuhan yang ada,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far Far mengungkapkan bahwa Dobo sudah diproyeksikan sebagai salah satu sentra perikanan di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, sejak tahun 2005 dikembangkan PP Dobo dan terus dikucurkan anggaran untuk pengembangannya hingga tahun ini. “Luas pelabuhan perikanan ini mencapai 6 hektar dengan proyeksi minimal berkelas pelabuhan perikanan tipe C yaitu pelabuhan perikanan pantai. Tahun ini kita kucurkan anggaran melalui APBD Provinsi Maluku sebesar Rp 11 milyar,” tuturnya.

“Pelabuhan perikanan ini harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Aru, baik melalui pemasukan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun untuk menggerakkan aktivitas nelayan lokal,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Pelabuhan Perikana Dobo Ali Tualeka berharap agar PP Dobo segera memiliki fasilitas yang lengkap dan akses jalan yang telah diperbaiki. “Kami sangat mengharapkan tambahan bantuan dari APBN KKP agar penyelesaian pembangunan pelabuhan perikanan ini dapat dipercepat,” ujar Ali.

Kepala BRSDMKP KKP Zulficar Mochtar berjanji pihaknya akan segera membawa seluruh harapan dan masukan dari kunjungan kerja ini untuk didiskusikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk penyelesaian pengembangan PP Dobo. Dengan sumber daya yang melimpah dan pembangunan yang sinergis dari seluruh pihak, ia yakin Dobo akan segera menjadi sentra perikanan terkemuka di tanah air.

**Lilly Aprilya Pregiwati**  
Kepala Biro Kerjasama dan Humas

Narasumber :

1. Zulficar Mochtar, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2. Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Biro Kerjasama dan Humas.

Informasi lebih lanjut :

Bagian Humas  
Biro Kerja Sama dan Humas  
email : [humas@kkp.go.id](mailto:humas@kkp.go.id), telp/fax : (021) 3514856, ext : 7503

